

PENGEOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBRSIHAN DAN PERTAMANAN DI KELURAHAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

PERLIAN WIRANATA OSKAR¹

Abstrak

Perlian Wiranata Oskar, Program S.1-Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Dibawah bimbingan Dr. A. Margono, M.Si dan Dr. Erwin Resmawan M.Si

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahaan, Kepala Seksi Persampahan, Ketua RT, dan Masyarakat yang mewakili Kecamatan Barong Tongkok. Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah sudah bagus, namun dari peralatan yang masih belum lengkap untuk memaksimalkan mengangkut sampah rumah tangga seperti masih kurangnya tempat sampah, dan turk pengangkut sampah.

Kata kunci : pengelolaan sampah, Kecamatan Barong tongkok

Pendahuluan

Seluruh Dunia memiliki masalah dengan sampah baik itu sampah organik dan sampah non organik. Salah satu penyebab yang membuat sampah

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: perlianoscar@gmail.com

itu menjadi susah untuk di hilangkan adalah kurangnya kesadaran dari orang - orang untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan hanya di Negara berkembang tetapi di Negara maju pun orang-orangnya masih membuang sampah sembarangan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dan sampah tidak dapat dipisahkan. Masalah yang menyebabkan adanya sampah dengan berbagai kepentingannya, mulai dari urusan rumah tangga, kantor, pasar, maupun industri.

Yang membuat sampah- sampah itu menjadi berceceran di jalan itu adalah bentuk sampah seperti Kategori sampah plastik yang terbesar berasal dari kemasan dan wadah seperti: botol-botol minuman, bungkus makanan ringan, bungkus rokok, botol sampo, koran dan lainnya. Jenis sampah plastik juga ditemukan pada jenis barang plastik yang penggunaannya bertahan lama seperti pada peralatan perlengkapan dan perabotan, dan barang plastik yang penggunaannya tidak bertahan lama seperti, diaper, kantong plastik, cangkir sekali pakai, perkakas, dan perlengkapan medis.

Yang di jalankan pada Dinas Kebersihan dan Pertanaman adalah tentang perda pengeolaa sampah yang dimana perda tentang pengelolaan sampah agar warga Kutai Barat khususnya di kecamatan Barong Tongkok tidak lagi membuang sampah rumah tangga disembarang tempat dan tidak ada lagi kekumuhan di sekitar daerah yang menjadi tempat bebas sampah seperti di daerah kecamatan Barong Tongkok. sampah yang telah dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau pedagang wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan atau membuang ke TPS pada pukul 19:00- 05:00 Wita. Perda No 05 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, pada BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN. pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dinas teknis berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di daerah;
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan / pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder / parit jalan dengan ukuran lembar sampah dengan 1 (satu) meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak mungkin dibangun;
3. Penyediaan / pengadaan TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara teknis dengan peraturan Bupati;
4. Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya;
5. Lurah, petinggi dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(2);
6. Lurah/petinggi berkewajiban membuat rencana kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penanganan sampah, di Kutai Barat khususnya di Kecamatan Barong Tongkok. Yang dimana sampai saat ini sampah menumpuk di sembarang tempat karena masyarakat biasa membuang di selokan, lahan yang kosong, dan di gorong-gorong. maka bagaimana cara Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menangani masalah sampah dan juga mengajak masyarakat untuk bisa membuang sampah rumah tangga mereka di tempat sampah yang sudah disediakan.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata policy yang secara etimologis dari kata polos dalam bahasa Yunani (Greek) berarti Negara atau kota. Dalam latin berubah menjadi *polotia* yang berarti Negara, sedangkan dalam bahasa Inggris lama (*middle English*) menjadi *policie* yang berkaitan dengan urusan Administrasi pemerintahan.

Kebijakan menurut Frefirich dalam Lubis (2007) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka mencapai satu tujuan.

Sedangkan menurut Raksastya dalam Lubis (2007) kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, ada tiga (3) unsure dalam kebijakan menurut Amara, antara lain :

- (1) Identifikasi tujuan yang akan dicapai
- (2) Strategi untuk mencapainya
- (3) Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti (1) Hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, (2) Adanya formulasi, (3) pelaksanaan adalah orang-orang dalam organisasi, dan (4) Adanya perilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan dan pelaksanaannya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya kebijakan yang dibuat oleh pejabat, instansi pemerintahan atau kelompok-kelompok tertentu.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan suatu masalah untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat dan tujuan itu akan terwujud jika ada faktor-faktor pendukung (input).

Kebijakan publik menurut Dye dalam Subarsono (2008) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Artinya bahwa maksud dari konsep tersebut sangatlah luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public, suatu contoh misalnya ketika pemerintah mengetahui ketika ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti sudah mengambil kebijakan.

Bridgman dan Davis dalam Suharto (2007) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada umumnya memiliki pengertian “*whatever government choose to do or not to do*” artinya kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerinhan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Kadang-kadang, kebijakan pubik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang –bidang tertentu dalam sector fasilitas umum, pendidikan, transportasi, kesehatan, perumahan atau kesejhateraan. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, air, perumahan rakyat, lembaga-lembaga rehabilitasi sosial adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bidang kebijaksanaan publik.

Pengertian Manajemen

Manajen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen, eksternal, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.

Manajemen menggerakkan segenap sumber daya organisasi sedemikian rupa secara harmonis dalam mencapai tujuan oranisasi. Karena itu manajemen mengisyaratkan adanya unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antarmanusia, dan manusianya itu sendiri.

Kontz dan O’Donnel (1968) dalam bukunya *principles of management an Analysis of Management Function* mengatakan bahwa, managenebt involves things done through and with people” (manajemen meliputi usaha pencapaian sesuatu dengan dan melalui orang-orang).

Dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut maka dapat diidentifikasi fungsi-fungsi yang berbeda yang akan ditugaskan kepada pejabat-pejabat (manajer) tertentu secara tertib.

Fungsi Manajemen

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan disusunlah suatu rangkaian kegiatan yang sistematis sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan tertib, efektif, dan efisien. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan operasional dari peran yang melekat padanya disebut dengan fungsi. Fungsi manajemen berarti adalah segenap kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif, dan efisien.

Agar kegiatan yang akan dilakukan dapat tertib, efektif, dan efisien, maka dibuatlah pembagian pekerjaan dan pengelompokan pekerjaan berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. pertimbangan klasifikasi tersebut sangat relatif, tergantung pada jenis dan tipe organisasi, kemampuan sumber daya organisasi dan sasaran yang hendak dicapai. Karena itu, beberapa ahli manajemen mengklasifikasikan fungsi manajemen tersebut berdasarkan sudut pandang yang bermacam-macam, namun pertimbangan tertib, efektif, dan efisien sebagai dasar atau prinsip manajemen tetapi melandasi pendapat mereka.

Mc Farland (1959:42) dalam Salam (2002), mengatakan bahwa fungsi manajemen ada tiga disingkat dengan akronim POCO, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Controlling* (pengawasan).

Newman (1963: 4) dalam Salam (2002), mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 5 yang akronomi disingkat dengan akronim POASCO, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Assembling Resources* (pengumpulan sumber daya).
4. *Supercising* (pengadilan kerja).
5. *Controlling* (pengawasan).

Koontz dan O'Donnel (1968: 70) dalam Salam (2002), berucap bahwa fungsi manajemen ada lima yang disingkat dengan akronim POSDICO, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Staffing* (penyusunan pegawai).
4. *Directing* (pengarahan kerja).
5. *Controlling* (pengawasan).

Fungsi manajemen ada tujuh yang disingkat dengan akronim PASDCORB, Gulick (1937: 13) di dalam Salam (2002), mengemukakan sebagai berikut:

1. *Plannig* (Perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Staffing* (penyusunan pegawai).
4. *Directing* (pengarahan).

5. *Coordinating* (pengkordinasian).
6. *Reporting* (pelaporan).
7. *Budgetting* (anggaran).

Terry (1961:121) di dalam Salam (2002), mengutarakan pendapatnya fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) ialah:

1. *Planning* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Actuating* (penggerakan).
4. *Controlling* (pengawasan).

Gibson et.al (1992:35) di dalam Salam (2002), mengatakan bahwa fungsi utama dari manajemen ada tiga, yaitu

1. *Planning* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Controlling* (pengendalian)

Dengan demikian, berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat diambil inti sari bahwa fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penyusunan staf (departemenisasi)
4. Penggerakan
5. Pengendalian

Perencanaan adalah usaha untuk membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi (karyawan) secara proposional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing unit/pejabat.

Pengelolaan Sampah

Menurut Totok Gunawan (2004) lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup mulai dari organisme yang tidak kasat mata sampai pada hewan dan vegetasi raksasa yang terdapat dipermukaan bumi. Sedangkan lingkungan abiotok merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang bukan berupa organisme. Adanya keinginan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ideal ialah membentuk manusia Indonesia seutuhnya secara material dan spiritual melihat dari dua sudut pandang yaitu pembangunan berwawasan lingkungan dan kualitas lingkungan hidup.

Gunawan (2004) lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup mulai dari organisme yang tidak kasat mata sampai pada hewan dan vegetasi raksasa yang terdapat dipermukaan bumi. Sedangkan lingkungan abiotok merupakan

segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang bukan berupa organisme. Adanya keinginan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ideal ialah membentuk manusia Indonesia seutuhnya secara material dan spiritual melihat dari dua sudut pandang yaitu pembangunan berwawasan lingkungan dan kualitas lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup merupakan dengan menjaga dan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitar yang berhubungan dengan mutu hidup. Kualitas hidup dapat ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusiawi dan terpenuhinya kebebasan untuk memilih. Lingkungan harus dijaga agar dapat mendukung terhadap kualitas berupa tingkat hidup masyarakat lebih tinggi. Lingkungan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sumber daya serta mengurangi zat pencemaran dan ketegangan Hidup, daya dukung lingkungan ialah kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung peri kehidupan dan makhluk hidup lainnya.

Sugandi (2005) berkata untuk menanggulangi masalah kerusakan yang terjadi pada lingkungan perlu diadakan konservasi. Konservasi dapat diartikan sebagai upaya memelihara lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai bangsa. Apabila lingkungan tercemar maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kehidupan masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penentuan Standar Pengelolaan

Dinas yang masih baru sehingga berkendala dengan perlengkapan-perengkapan yang untuk menunjang fungsi pekerjaan mereka yaitu menangani sampah, bisa kita lihat dari kurangnya tenaga kerja di lapangan hal ini membuat pekerjaan itu masih belum maksimal, untuk TPS nya juga yang masih kurang yang membuat warga menjadi kurang sadar untuk membuang sampah mereka pada tempatnya. Di sebabkan tempat sampah yang masih belum cukup, dan kendala yang selanjutnya juga armada pengangkut sampahnya yang masih belum cukup sehingga pekerjaan mengangkut sampahnya masih belum maksimal.

Penentuan Prosedur

prosedur pengelolaan yang mengacu kepada perda sehingga tugas-tugas yang mereka kerjakan disetiap bidang mereka masing-masing sudah di kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga tidak ada lagi urusan – urusan masalah tentang mekanisme pengelolaan sampah itu saling tunjuk antara bidang satu dengan bidang yang lain. Karena itu lah di buat Kelapa bidang kebersihan dan persampahan, di bawahnya ada kepala seksi kebersihan dan kepala seksi persampahan. Hal ini untuk mereka mengacu pada perda tentang tugas bidang mereka masing-masing agar pekerjaan dapat dikerjakan

dengan baik.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kutai Barat

Dalam hal ini yang dimaksud pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dinas kebersihan dan pertamanan sebagai penyelenggara pengelolaan sampah memiliki; tugas, wewenang, dan kewajiban. (yang dimaksud pada pasal 23,24,dan 25) yang berbunyi:

Pasal 23 (Tugas).

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan Penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antara lembaga pemerintahan Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 24 (wewenang)

- 1.) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain;
 - d. Melakukan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggapan darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenagnannya.

- 2.) Penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggapan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 25 (Kewajiban)

- 1.) Dinas Teknis berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di daerah;
- 2.) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai 1 (satu) meter termasuk penyediaan gerobak pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun;
- 3.) Penyediaan/pengadaan TPS sebagaimana pad ayat (2) ditentukan secara teknis dengan Peraturan Bupati;
- 4.) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya;
- 5.) Lurah, petinggi dan ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 6.) Lurah/petinggi berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Selain peran dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, masyarakat Kutai Barat juga memiliki kewajiban dalam hal pengelolaan sampah seperti tertuang dalam pasal 26, yang berbunyi Kewajiban Masyarakat:

- 1.) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya;
- 2.) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah;
- 3.) Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
- 4.) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- 5.) Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau pedagang wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan/membuang ke TPS pada pukul 19:00-05:00 Wita.

Penentuan standar Pengelolaan

prosedur pengelolaan yang mengacu kepada perda sehingga tugas-tugas yang mereka kerjakan disetiap bidang mereka masing-masing sudah di

kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga tidak ada lagi urusan – urusan masalah tentang mekanisme pengelolaan sampah itu saling tunjuk antara bidang satu dengan bidang yang lain.

Karena itu lah di buat Kelapa bidang kebersihan dan persampahan, di bawahnya ada kepala seksi kebersihan dan kepala seksi persampahan. Hal ini untuk mereka mengacu pada perda tentang tugas bidang mereka masing-masing agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik.

Penentuan Prosedur

prosedur pengelolaan yang mengacu kepada perda sehingga tugas-tugas yang mereka kerjakan disetiap bidang mereka masing-masing sudah di kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga tidak ada lagi urusan – urusan masalah tentang mekanisme pengelolaan sampah itu saling tunjuk antara bidang satu dengan bidang yang lain.

Karena itu lah di buat Kelapa bidang kebersihan dan persampahan, di bawahnya ada kepala seksi kebersihan dan kepala seksi persampahan. Hal ini untuk mereka mengacu pada perda tentang tugas bidang mereka masing-masing agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan

Dari hasil wawancara di atas dapat menyimpulkan yaitu pembinaan yang di berikan kepada petugas teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar pekerjaan yang dilakukan tidak sembarangan sehingga mereka bisa mentaati aturan yang berlaku, seperti masalah absesnsi yang tepat waktu dan juga pekerjaan yang harus terlaksana dan maksimal. Selain pembinaan juga ada lagi pengawasan agar petugas-petugas teknis dapat di control memlalui korlap, sehingga pekerjaan yang menurut mereka belum maksimal dapat di tegur oleh korlap.

Pemantauan dan Evaluasi

hasil dari laporan-laporan baik itu dari laporan bulanan dan laporan tahunan, maka akan diserahkan kepada kepala dinas agar laporan itu untuk laporan selama 1 tahun ini mengenai program pekerjaannya, setelah itu akan di serahkan lagi kepada Sekda dan Bupati untuk pembuktiaan hasil kerjaan selama satu tahun program kerja mereka kepada kepada pemerintah Provinsi.

Karena itu lah setiap pekerjaan dari setiap bidang mempunyai kordinator pengawas, agar pekerjaan mereka bisa maksimal untuk menjalankan tugas sehingga nanti dapat dipertanggung jawabkan kepada atasan mereka. Selain itu dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini melaksanakan tugas mereka yang disesuaikan dengan perda tentang pengelolaan sampah, yaitu ada bagian kebersihan dan persampahaan yang tugasnya dilapangan atau di pemukiman masyarakat untuk melakukan kebersihannya seperti di selokan maupun sumbatnya sampah-sampah yang ada

di parit. Dan juga bagian pertamanan yang melaksanakan tugas nya membsihkan taman-taman pemkab dan penanganan kuburan juga.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil penulis bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagiaan sektor untuk mengangkut sampah sudah dapat teratasi. Walaupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini masih terbilang Dinas yang masih baru karena baru 2 tahun berjalan program pengelolaan sampah akan tetapi penanganan sampah yang ada di sekitar Kecamatan Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, dan Linggang Bigung sudah dapat teratasi dengan baik. Maka dari itu penulis menarik kesimpulan yaitu :

- a. penentuan standar pengelolaan sudah dapat terlaksana dengan baik, dengan mengacu kepada Perda No 05 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. sehingga penanganan sampah rumah tangga dapat ditangani, maka dari itu dari Dinas Kebersihan dan pertamanan dalam perencanaan target pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA. Ada juga pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Penentuan prosedur pengelolaan yang di lakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah mencakup prosedur pengelolaan sampah dengan baik, seperti sampah- sampah yang dari rumah di buang di tempat pembuangan sampah (TPS) sehingga nanti ada petugas pengangkut sampah yang mengambil sampah rumah tangga tersebut dan setelah itu akan di olah lagi di tempat pemerosesaan akhir (TPA).
- c. Pembinaan dan pengawasan penglolaan untuk memberikan pemahaman kepada petugas dan staf kantor agar dapat mengerjakan tugas –tugas yang di jalankan bisa dijalankan dengan baik, dari pembinaan dan pengawasan ini untuk menumbuh kembangkan SDM pegawai-pegawai DKP, tentang pengelolaan sampah.

Pemantauan dan evaluasi adalah memantau petugas-petugas dilapangan dengan melihat hasil pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum, dari pemantauan ini dievaluasi hasil-hasil kerja pegawai satu bulan terakhir, apakah pekerjaan mereka sudah bagus atau masih ada yang harus di koreksi lagi. Di bagian pelaporan untuk petugas di lapangan memiliki korndinator lapangan yang mengkordinir pekerjaan di lapangan, sehingga bila ada masalah bisa di pertanggung jawabkan kepada kordinator lapangannya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas terutama melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat, peneliti mempunyai beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah petugas pengangkut sampah dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan atau diklat perlu diadakan. Supaya tercipta petugas yang berkualitas yaitu petugas yang mempunyai kemampuan dan pengalaman pengelolaan sampah maupun tentang kebersihan lingkungan. Pemberian gaji tambahan terhadap petugas lapangan yang bekerja dengan baik dan memberikan hukuman terhadap petugas lapangan yang tidak disiplin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.
2. Sampah-sampah yang berceceran dapat teratasi dan bebas dari kekumuhan. Jika lingkungan masyarakat sudah bersih maka masyarakat akan segan untuk membuang sampah di sembarang tempat lagi.
3. Pemerintah perlu menetapkan peraturan untuk pemilik toko, super market, agar wajib menggunakan kantong kemasan yang mudah terurai oleh proses alam.
4. memberikan teguran yang tegas atau memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah di jalan umum, selokan-selokan, sungai atau tempat-tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan baik terutama alat transportasi yaitu kendaraan roda empat dan armada pengangkut sampah, Dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan baik, maka akan memudahkan petugas dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di daerah Kutai Barat Khususnya di Kecamatan Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, dan Linggang Bigung.
6. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan, sehingga sosialisasi dapat menjadi suatu sistem penyampaian informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, pelayanan persampahan/kebersihan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Daftar Pustaka

- Chana, William. 2001. *Moral Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius Dharma
- Lubis, M. Solly. 2007. *kebijakan publik*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2006. *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*. Jakarta: Gaung Persada Press.

- Mukhtar, 2007. *Bimbingan Skripsi, tesis, dan Artikel Ilmiah*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Murthado, D.said.1997. *penanganan pemanfaatanLimbah Padat*. Jakarta: Sasaran Perkasan
- Subarsono, AG.2008. Analisis kebijakan publik: *konsep,teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo Joko. 2004, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta Jakarta
- Suharto, Edi.2007. *kebijakan sosial: sebagai kebijakan publik*, Bandung Alfabeta Bandung
- Setyawan Salam, M.Ed. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Singaribun, Masri dan Effendi Sofian. 1990. *Metode penelitian surve*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Soerjono soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta
- Sugandi, Dede. 2005. *Geografi*. Bandung: Regina
- Tanjung. 2007.” *Pengelolaan Sampah yang Baik*” [Http://Wahli.Org.Id](http://Wahli.Org.Id) (Diakses 14 Maret 2014)
- Totok Gunawan. 2004. *Fakta dan Konsep*
- Dokumen-dokumen :**
Perda No 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
- Sumber Internet :**
<http://ooyi.wordpress.com/2014/02/15/sampahdiindonesia/http://.menkokesra.go.id/content/view/9776/35> (diakses 17 januari 2014)
<https://www.google.co.id/search?aq=2&oq=sampah+di+indonesia&sugexp=cchrome,mod=7&sourceid=chrome&ie=UTF8&q=fenomena+sampah+di+indonesia> (diakses 17 januari 2014)